



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengadaan Lahan Jadi Beban APBD

Sebagai salah satu pos terbesar di APBD, anggaran pengadaan tanah dan lahan terserap kurang dari 20 persen. Efektivitas anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan warga DKI Jakarta pun dipertanyakan.

JAKARTA, KOMPAS — Dengan total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 sebesar Rp 77,11 triliun, anggaran pengadaan lahan dan tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai sekitar Rp 5,15 triliun.

Anggaran itu terbagi ke empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang mempunyai anggaran terbesar pengadaan lahan. Keempatnya adalah Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Bahkan, 87 persen atau Rp 1,95 triliun anggaran Dinas Kehutanan untuk pengadaan lahan dan lahan. Adapun Dinas SDA mendapat Rp 1,8 triliun atau sekitar 58,8 persen.

Dinas Bina Marga memperoleh alokasi pengadaan lahan Rp 600 miliar atau 29,48 persen. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalokasikan Rp 799,99 miliar atau 27,28 persen dari total anggaran untuk kegiatan serupa.

Hingga 19 Juni 2018, serapan empat SKPD untuk pengadaan lahan dan tanah masih di bawah 20 persen. Artinya, pengadaan lahan berjalan lambat.

Seperti disebutkan Kepala Dinas SDA DKI Teguh Hendarwan sebelumnya, rendahnya serapan anggaran di dinas yang dipimpinya disebabkan pembebasan lahan masih seret karena masalah administrasi lahan.

Pada hal, pengadaan lahan ini vital untuk awal berbagai proyek prioritas, seperti antisipasi banjir dengan normalisasi kali, pembangunan waduk, dan pengaliran air yang terbuka hijau.

Sepanjang 2018, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane belum melanjutkan normalisasi Kali Ciliwung karena menunggu pembebasan lahan oleh Pemprov DKI.

Blessmiyanda, Plt Badan Pelaksana Penyediaan Barang dan Jasa DKI Jakarta, memantapkan, ada anggaran rumah susun 2018 yang tidak bisa dieksekusi karena ketidaksiapan lahan. Menurut dia, hal itu terjadi setiap kali dinas serah dalam perencanaan anggaran.

Melongok laman resmi Bappeda DKI, penyerapan anggaran yang rendah dimulai dari triwulan pertama 2018. Sampai Maret 2018, realisasi penyerapan belanja langsung (BL) Maret 2018 sebesar Rp 1,78 triliun atau 5,93 persen. Realisasi Maret 2018 minus 3,37 persen dari target Rp 2,80 triliun atau 9,3 persen. Apabila dibandingkan dengan belanja langsung pada periode sama tahun lalu (*year on year/YoY*), penyerapan BL Maret 2018 mengalami peningkatan 0,37 persen dibandingkan penyerapan BL 2017 yang 5,56 persen.

Untuk belanja barang dan jasa pada Maret 2018 sebesar Rp 1,23 triliun atau 10,28 persen. Angka ini naik 0,09 persen dibandingkan periode yang sama 2017.

Belanja modal pada Maret 2018 tercatat Rp 107,6 miliar atau sebesar 0,72 persen. Penyerapan belanja modal tahun 0,17 persen dibandingkan Maret 2017. Penyerapan belanja modal yang rendah disinyalir terkait kegiatan pembebasan tanah yang tidak lancar, antara lain di Dinas Kehutanan, Dinas SDA, dan Dinas Bina Marga. Hal itu terus berlangsung hingga 20 Juni 2018.

Naik drastis

Koordinator Kawal Jakarta Idris Ahmad mengatakan, rendahnya penyerapan anggaran pengadaan lahan sudah dapat diduga sebelumnya. Sebab, perencanaannya terindikasi buruk. Salah satunya terlihat dari pengalangan anggaran dalam waktu sangat singkat saat pembahasan

rencana APBD (RAPBD).

Waktu pembahasan RAPBD 2018, Desember lalu, anggaran pengadaan lahan naik sampai Rp 2,3 triliun hanya dalam waktu dua pekan saja. Ini artinya penganggaran ini tidak ada perencanaan dan sasaran lahan yang pasti. Seharusnya, dipastikan dulu lahan mana yang akan dibebaskan dan kondisinya sudah *clear and clean*, paparnya.

Dengan anggaran pembebasan lahan yang cukup besar di dinas-dinas itu, terlihat adanya pemaksaan menaikan anggaran. Disebutkan Idris, anggaran pembebasan lahan di Dinas Kehutanan ataupun Dinas SDA dipaksakan naik tanpa tahu pasti status lahan yang dicari, apakah bisa dibeli atau tidak, serta kejelasan peruntukannya. Ini mengindikasikan perencanaan anggaran yang tidak matang.

Menurut Idris, anggaran yang sangat besar, jika tak terserap, sangat tidak efektif. Kondisi ini juga ganjil dengan banyaknya aset lahan Pemprov DKI Jakarta yang belum dimanfaatkan.

Idris mengingatkan serapan rendah di semester pertama biasanya akan diikuti lonjakan penyerapan anggaran di akhir tahun. Hal ini perlu diwaspadai. Sebab, lonjakan di akhir tahun bisa menjadi celah para makelar yang mengincar anggaran pemerintah dengan memanfaatkan waktu yang sangat mepet.

"Ini bisa jadi lahan yang dibeli ternyata bermasalah, status tanah tidak jelas, ataupun tak sesuai dengan rencana peruntukan. Sudah beberapa kali terjadi," ujarnya.

Program untuk warga

Direktur Centre For Budget Analysis Jehok Sky Khadali berpendapat, kelangkaan mengalokasikan anggaran besar ke kegiatan yang tidak bisa terserap optimal. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk program lain yang langsung menyentuh kesejahteraan warga.

Idris memcontohkan, program yang langsung menyentuh masyarakat itu di antaranya subsidi untuk Kartu Jakarta Pintar, subsidi pangan, dan meningkatkan premi BPJS Kesehatan kelas 5 warga DKI.

Adapun kenaikan anggaran lahan ini berkontribusi pada mengembangnya target pemasukan asli daerah (PAD). PAD ini digunakan untuk membiayai rencana anggaran itu, termasuk pembebasan lahan. Artinya, pemerintah harus menggenjot PAD, salah satunya dari pajak.

"Kalau tak terserap, ini akan menjadi dosa besar pemerintah, yaitu pajak yang ditarik dari warga tak dikembalikan ke warga," kata Uchok.

Nirwono juga, penjabat perkotaan, berpendapat, normalisasi kali membutuhkan relokasi atau pembebasan lahan. Karena perlu relokasi gubernur dan wakil gubernur mesti jelas membebi solusi, warga yang dipindah akan ditempatkan di rusun yang disiapkan.

"Kalau tema HUT DKI tahun ini adalah adil, maju, dan bahagia, semestinya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI juga mesti melihat adil itu juga untuk semua, termasuk adil terhadap tata ruang. Gubernur dan Wakil Gubernur seharusnya tidak membolehkan warga tinggal di bantaran kali. Kalau mau bicara adil, ya, mereka harus tinggal di tempat yang layak dan tegakkan aturan. Jangan sebaliknya tidak gusur karena meribela warga kecil," kata Nirwono menegaskan.

Karena kurang dukungan dari pemerintah untuk program prioritas, seperti normalisasi kali, Dinas SDA yang seharusnya memulai pembebasan lahan terkesan ragu-ragu melakukan pembebasan lahan. (HLL/ARE)

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

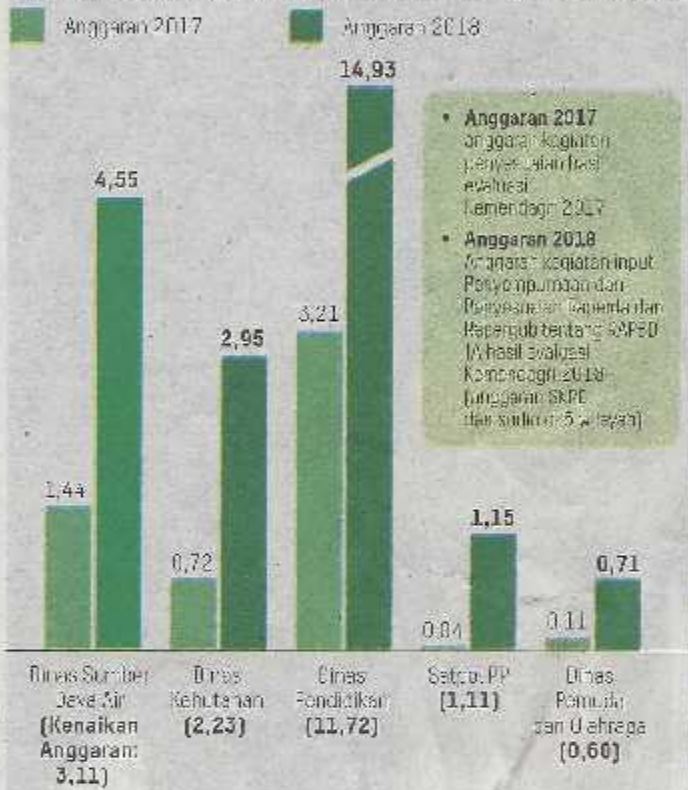
Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Pengadaan Lahan Jadi Beban APBD

Kenaikan Anggaran Sejumlah SKPD APBD DKI Jakarta

Perbandingan Anggaran APBD 2017-2018 (triliun rupiah)



Penggunaan Anggaran Dinas Sumber Daya Air (APBD 2018)

	Nilai (miliar rupiah)	Persentase
Pengadaan tanah sungai/saureh	853,4	26,0%
Pengadaan tanah wakaf STU/embung	528,7	16,1%
Pengadaan tanah untuk penggantian lahan unit pelayanan non Perbekalan Dinas Sumber Daya Air	450	13,7%

Penggunaan Anggaran Dinas Kehutanan (APBD 2018)

	Nilai (miliar rupiah)	Persentase
Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman di wilayah DKI Jakarta	27	1,2%
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Hutan di wilayah DKI Jakarta	250	11,2%
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Makam di wilayah DKI Jakarta	400	17,9%
Pengadaan Tanah Ruang Terbuka Hijau Taman di wilayah DKI Jakarta	1.300	58,0%

- Persentase: Penggunaan anggaran
- Dinas Kehutanan dulu disebut Dinas Perhutanan dan Perakaman

Sumber: Bidang Kominfo PJJ, hasil wawancara dengan pejabat terkait, publikasi media

